



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
KECAMATAN BOJONGGAMBIR**



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BOJONGGAMBIR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena atas perkenan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 telah selesai disusun dalam bentuk Dokumen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan dilaksanakan di Kecamatan Bojonggambir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kinerja berikut efisiensi anggaran. Capaian kinerja Kecamatan Bojonggambir sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran melalui Sasaran Strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

Akhirnya dengan telah disusunnya ini, besar harapan kami Kecamatan Bojonggambir dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bojonggambir dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 dapat diimplementasikan sebagai tolak ukur arah kegiatan tahun 2026.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi. Aamiin.

Bojonggambir, Januari 2025

Camat Bojonggambir



UCU MULYANA, S.IP

Pembina

NIP. 19760827 200901 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai.

1.2 Maksud dan Tujuan

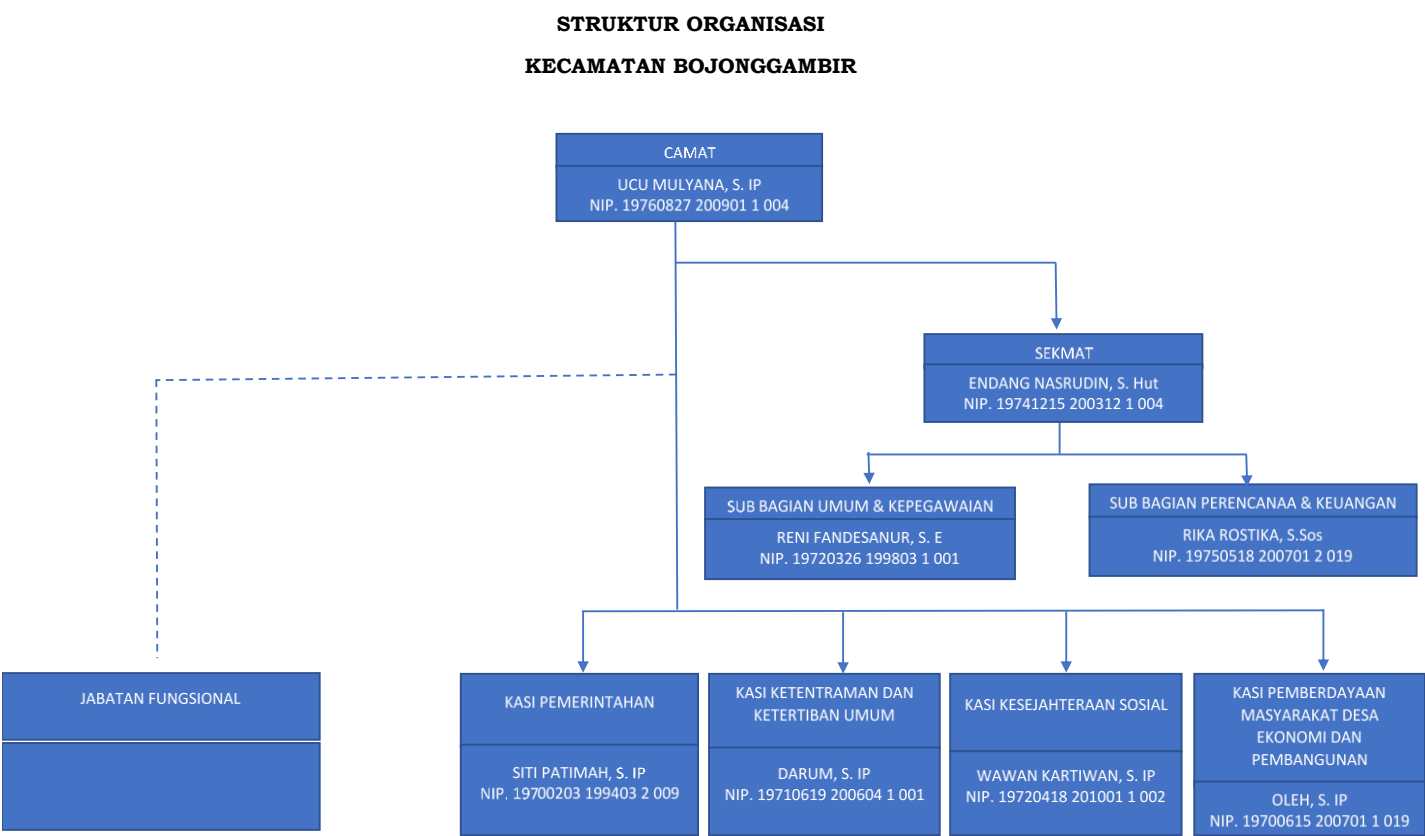
Penyusunan LKIP Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 adalah, sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dan efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa dating

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Susunan Organisasi Kecamatan Bojonggambir

Susunan Organisasi Kecamatan Bojonggambir terdiri dari:

- 1. Pimpinan adalah Camat;
- 2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
- 3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional.



1.4 **Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana**

1.4.1 **Kepegawaian**

Aspek kepegawaian pada Kantor Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - 2. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi PMDE dan P
- g. Kelompok jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab terhadap camat. Seksi masing masing dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Bojonggambir sebanyak 10 (selapan) Orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Sumber Daya Pegawai SKPD
Tabel 1.1
Personil Kecamatan Bojonggambir Berdasarkan Gender

No	Nama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekmat	1	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Trantibum	1		1
5	Seksi PMDE dan P	1		1
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1		1

No	Nama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
7.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1	1
8	Kasubag Umum dan kepegawaian	1		1
9	Fungsional Umum			
10	PPPK Paruh Waktu	1	1	2
Jumlah		7	3	10

Pegawai menurut Eselon, Pangkat dan Golongan

Dari Keseluruhan Pegawai Kecamatan Bojonggambir yang berjumlah 10 orang, berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 8 Orang, PPPK paruh Waktu 2 orang, Secara lengkap tentang Kepegawaian pada Organisasi Kecamatan Bojonggambir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pegawai menurut tingat eselon :

Tabel.1.2

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	4
4	Eselon Ivb	2
5	Fungsional Umum	0
6	Penata layanan Operasional	2
Jumlah		10

Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Bojonggambir yang berjumlah 10 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1.3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	0

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
2	S-1	9
3	Diploma	-
4	SLTA / Sederajat	1
5	SLTP / Sederajat	-
6	SD / Sederajat	-
	JUMLAH	10

Dengan dukungan 10 orang personil yang ada pada Kecamatan Bojonggambir dengan komposisi pendidikan, Sarjana 9 orang dan SLTA sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 0 orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mencapai dalam pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan capaian .

1.5 Isu Aktual

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Kecamatan Bojonggambir tidak terlepas dari isu aktual di lingkungan Kantor Kecamatan itu sendiri. Sebagaimana di uraikan dalam Rencana Strategis 2025-2029 sebagai berikut :

2. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur Desa
3. Penyusunan Renstra, Renja, lakip dan Laporan akhir Tahun Anggaran
4. Fasilitasi kebutuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat
5. Fasilitasi program dan Kegaitan di Desa
6. Pembinaan bidang pemerintahan desa
7. Pembinaan Linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketentraman ketertiban umum
8. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
9. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa
- 10.Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa

11. Peningkatan Fasilitas dan koordinasi program program kesejahteraan sosial dan Pemerintah
12. Penyusunan data base sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada

1.6 Sistematika Penyusunan

LAKIP Kecamatan Bojonggambir mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagai berikut :

Sistematika penulisan LKIP Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Aspek Kepegawaian dan sarana prasarana
- 1.5 Isu Aktual
- 1.6 Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

Pada bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Formulir Renstra
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Formulir Rencana Kinerja Tahunan
- 4) Rencana Aksi
- 5) Lampiran lainnya dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bojonggambir didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tasikmalaya dan Camat Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2025 dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, dan Rencana kerja Tahun 2025, Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan Renstra kabupaten yaitu meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tujuan di atas maka sasaran yang ingin di capai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bojonggambir
2. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir

Tabel 2.1
Sasaran Program pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya

NO	SASARAN	PROGRAM
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum
5.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya disesuaikan dengan mempertimbangkan isi strategis Tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan atas hal tersebut maka ditetapkan 5 (lima) program kegiatan pada Kecamatan Bojonggambir sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan di tetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator Kinerja sasaran sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.2
 PERJANJIAN KINERJA
 KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA
 TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojonggambir	65(B)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan Bojonggambir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojonggambir	81,5 Point
3.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%
4.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala daerah	100%
5.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang Undangan	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis RPJMD dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 capaian kinerja rata rata baik.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target.

Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran yang berkaitan dengan Misi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2024	Katagori
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65 (B)	67,55(B)	104,9%	baik
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,5Point	81,7 Point	100%	Baik
3	Meningkatnya profesionalitas	Persentase gangguan	100%	99,7%	99,29%	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2024	Katagori
	penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti				
4	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase potensi Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Baik
5	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kesadaran dan Pehaman Tentang Hak, Kewajiban , Kewenangan dan Tugas Pokok Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya	100%	100%	100%	Baik

Prosentase capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran diperoleh berdasarkan perbandingan target dan realisasiindikator sasaran yaitu menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 2 (dua) sasaran menunjukan sebanyak 2 (dua) sasaran termasuk kedalam kategori Baik.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategi kesatu yaitu Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indicator Kinerja sasaran yang harus di capai yaitu “ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) Kecamatan”. Untuk mencapai indicator kinerja sasaran strategis

tersebut melaksanakan 1 (satu) program (program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten sebagaimana tabel berikut :

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Katagori
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65 (B)	67,55 (B)	103,8%	Baik

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	64.9 (B)	61 (B)	67,55(B)	65 (B)	67,5 (B)*Thn 2024

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	65(B)	67,5 (B)	103,8 %	65 (B)

Pada sasaran kesatu realisasi Tahun 2025 ini belum ada penilaian AKIP dari Inspektorat, sehingga yang kami cantumkan capaian Nilai Tahun 2024 , adapun capaian tahun sebelumnya yaitu 64,9 point .

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 64,9 point dari target Renstra sebesar 65 point, Capaian ini katagori Baik dan capaian Indikator Kinerjtja dari

tahun ke tahun mudah mudahan dapat meningkat sehingga capaian target AKIP Kecamatan Bojonggambir dapat mendekati capaian Renstra yang telah ditetapkan.

Salah satu ukuran kurangnya capaian kinerja yang belum memenuhi target Resntra. adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia di kantor Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 yaitu terdapat staf yang pensiun sehingga kinerja Kecamatan Bojonggambir mengalami hambatan.

Pegawai adalah salah satu aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi dan kemampuan aparatur juga dapat ditingkatkan.

Capaian nilai evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/ komponen seperti perencanaan dan pengukuran Kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintahan daerah. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rewiu program kegiatan pada Renwal , Renja dan Renja perubahan Tahun Anggaran 2025
- b. Melaksanakan Asistensi penyusunan , perencanaan dan penetapan anggaran Tahun 2025
- c. Melakukan integrase e sakip dan e kinerja

Dalam capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan tentunya di dukung dengan Program kegiatan yang di laksanakan di kantor Kecamatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategi Kedua yaitu Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan, dengan indikator Kinerja yaitu “ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Target indikator Kinerja tersebut yang di capai Tahun 2025 yaitu

sebesar 81,7 , untuk mencapai indikator tersebut di dukung dengan Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik. sebagaimana tabel berikut:

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Katagori
1	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,5 Point	81,7 Point	100%	baik

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,50 Point	81,26 Point	81.20 Point	81,26 Point	81.5 Point	81,7 Point

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,5 Point	81,7 Point	100 %	81,95 Point

Pada sasaran kedua realisasi Tahun 2025 ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu capaian Tahun 2024 mencapai 81,26 point dan dalam capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tahun 2025 yaitu 81,7 Point.

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar 81,7 point dari target Renstra sebesar 81,89 point. Dilihat dari persentase tingkat capaian pelaksanaan Kinerja Kecamatan Bojongsabir masuk ke dalam katagori Baik,

sehingga harus mampu mempertahankan Kinerja di masa yang akan datang. Faktor utama yang menjadi kendala pencapaian keberhasilan capaian kinerja adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai di Kantor kecamatan.

Dalam capaian Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan, dengan indicator Kinerja yaitu “ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Kecamatan di dukung dengan Program kegiatan yang di laksanakan di kantor Kecamatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat.

Sasaran Strategis Ketiga yaitu Meningkatnya Koordinasi wilayah Kecamatan Bojonggambir dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus di capai yaitu :

- 1. Presentase gangguan ketentraman dan ketertiuban umum yang di tindaklanjuti
- 2. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran ketiga di lihat pada capaian penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Katagori
-----	-------------------	-------------------	-------------	----------------	--------------	----------

1	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	99,70%	100%	Baik
2	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	Baik
3	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	100%	Baik

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%
2	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Target Akhir Renstra
-----	-------------------	-------------------	------------	----------------------

			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	99,70%	Baik	100%
2	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Baik	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	Baik	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas di ketahui rata rata capaian kinerja sasaran 100%, dengan koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah telah di laksanakan dengan hasil baik. Dengan capaian kinerja sasaran ke 3 (tiga) ada factor pendukung capaian kinerja pada program berikut :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Evaluasi Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana Kepala SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Bupati Tasikmalaya melalui Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Hasil evaluasi LPPD ini dapat di jadikan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pada masa yang akan datang.

3.2 Realisasi Anggaran.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Bojonggambir tahun 2025 dilakukan terhadap belanja daerah/operasional Kecamatan Bojonggambir. Anggaran dan realisasi APBD atas kegiatan yang

strategis tersebut digunakan sebagai input pada kegiatan yang dilakukan .

Tolok ukur pencapaian target kinerja Kecamatan Bojonggambir juga terdapat kegiatan–kegiatan operasional lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja Kecamatan Bojonggambir

Realisasi APBD pada Kecamatan Bojonggambir tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN BOJONGGAMBIR
TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	UNSUR KEWILAYAHAN	1.896.398.939	1.663.608.535	87,72
	KECAMATAN	1.896.398.939	1.663.608.535	87,72
	Kecamatan Bojonggambir	1.896.398.939	1.663.608.535	87,72
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.594.979.239	1.372.164.235	86,03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.421.977.039	1.201.356.594	84,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.421.977.039	1.201.356.594	84,48
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	767.374.190	656.764.556	85,59
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	654.602.849	544.592.038	83,19
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	654.602.849	544.592.038	83,19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.392.400	45.337.400	99,88
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.960.200	19.960.200	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.885.100	8.885.100	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.387.000	2.387.000	100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	125.000	125.000	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.559.000	1.559.000	100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.721.600	1.721.600	100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.282.500	2.282.500	100,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000	3.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.702.200	6.702.200	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.702.200	6.702.200	100,00

Kode Rekening	Uraian Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.230.000	2.230.000	100,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.230.000	2.230.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	7.000.000	100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.000.000	7.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.500.000	9.445.000	99,42
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.650.000	2.640.000	99,62
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.850.000	6.805.000	99,34
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.400.000	47.160.741	97,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	10.760.741	89,67
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000	1.760.741	58,69
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.000.000	9.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.400.000	36.400.000	100,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	26.000.000	26.000.000	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.400.000	10.400.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.209.800	78.309.500	98,86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.668.800	65.768.500	98,65
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	3.200.000	100,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	43.137.000	43.137.000	100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.300.000	2.399.700	72,72
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.031.800	17.031.800	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.541.000	12.541.000	100,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.541.000	8.541.000	100,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000	4.000.000	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.055.000	52.639.000	84,83
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.675.000	21.675.000	100,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.675.000	21.675.000	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.053.000	2.053.000	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.733.400	2.733.400	100,00

Kode Rekening	Uraian Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.393.600	1.393.600	100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	220.000	220.000	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.275.000	14.275.000	100,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000	1.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.120.000	11.120.000	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11.120.000	11.120.000	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.792.200	3.792.200	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.219.400	1.219.400	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.228.400	2.228.400	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.880.000	3.880.000	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.260.000	19.844.000	67,82
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.260.000	19.844.000	67,82
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000	2.480.000	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.670.000	1.670.000	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.140.000	1.140.000	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.700.000	3.700.000	100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.280.000	5.864.000	38,38
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.990.000	4.990.000	100,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	188.600.000	188.040.600	99,70
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	188.600.000	188.040.600	99,70
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	188.600.000	188.040.600	99,70
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.371.250	2.371.250	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.332.000	1.332.000	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	650.000	650.000	100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.006.750	1.006.750	100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	153.550.000	152.990.600	99,64
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000	2.010.000	100,00

Kode Rekening	Uraian Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000	9.000.000	100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000	18.000.000	100,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.287.500	24.287.500	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.287.500	24.287.500	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.287.500	24.287.500	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.163.900	1.163.900	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	498.000	498.000	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.967.200	1.967.200	100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.353.400	5.353.400	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.015.000	2.015.000	100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.200.000	11.200.000	100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.425.000	1.425.000	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	665.000	665.000	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.477.200	26.477.200	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.477.200	26.477.200	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.302.200	10.302.200	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	904.100	904.100	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	678.100	678.100	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.160.000	1.160.000	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	3.900.000	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.660.000	3.660.000	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000	16.175.000	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	459.000	459.000	100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	141.000	141.000	100,00

Kode Rekening	Uraian Urusan,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
	Kertas dan Cover			
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	200.000	200.000	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.550.000	4.550.000	100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	675.000	675.000	100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.150.000	3.150.000	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	7.000.000	100,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.000.000	7.000.000	100,00

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber tertentu daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojonggambir Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Bojonggambir menunjukkan capaian indikator sebesar 100 % dan indikator sasaran Tingkat Capaian Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojonggambir menunjukkan capaian indikator sebesar 100 %.

Prosentase capaian kinerja di atas diperoleh berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator sasaran Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan acuan mutlak/satu-satunya dasar pertimbangan mutlak untuk mengukur tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya. Secara sederhana pula dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kecamatan Bojonggambir tahun 2025 memiliki predikat baik.

Kecamatan Bojonggambir pada Tahun 2025 menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya, Sumber daya keuangan yang di gunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2025, dengan Rencana anggaran Rp. 1.896.398.939,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 1.663.608.535,00 atau penyerapan anggaran mencapai 87,72%.

Akhir kata, dengan segala kekurangan didalamnya diharapkan kiranya LKIP Kecamatan Bojonggambir tahun 2025 ini dapat memenuhi standar akuntabilitas yang dipersyaratkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bojonggambir kepada Bupati Tasikmalaya.

Bojongsambir , 22 Januari 2026
Camat Bojongsambir



UCU MULYANA,S.IP

Pembina

NIP. 19760827 200901 1 004